

JURNAL

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI
TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN USAHA
DI KABUPATEN KLATEN**



Disusun oleh :

PRIMASTUTI SARI ANGGRAENI

N P M :130511149

Program studi :Ilmu Hukum

Program Kekhususan :Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI
TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN USAHA
DI KABUPATEN KLATEN**



Diajukan oleh :

PRIMASTUTI SARI ANGGRAENI

N P M :130511149

Program studi :Ilmu Hukum

Program Kekhususan :Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui oleh dosen pembimbing

Dosen Pembimbing I Tanggal : 23 Maret 2017

Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum. Tanda tangan:

Dosen Pembimbing II Tanggal : 23 Maret 2017

B. Hengky Widhi A, S.H.,M.H. Tanda tangan:

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI
TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN USAHA
DI KABUPATEN KLATEN**

Primastuti Sari Anggraeni

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: primastutisarianggraeni@yahoo.co.id

Abstract

Administration Law Enforcement through the Violation of Permits Building License for Business at Klaten.

This research is titled Administration Law Enforcement through the Violation of Permits Building License for Business at Klaten. The background of this research is because there are some Buildings for business in Klaten has no Permits Building License. The problem formulations are 1. How does the Administration Law Enforcement solve the problems of Building for business that has no Permits Building License in Klaten? 2. What are the efforts of government to uphold the administration law through the Permit Building License for business in Klaten? This research is uses normative law. The results are 1. Civil service police unit gives 4 punishments (a) Persuasive approach (b) Warning letter (c) Release and sealing (d) Building destruction. 2. The government effort to uphold the administration law through the Violation Permits Building License for business is government officials have made guidance to every entrepreneur how one to register their business but they do not have Permits Building License yet, and the government keep controlling by using SKPD and also harsh prosecution.

Keywords: Administration Law Enforcement, Permits Building License, Business

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejatinya setiap masyarakat mempunyai hak untuk membangun dan membuka usaha. Namun, hak tersebut haruslah disertai dengan prosedur dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, memiliki otonomi daerah sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah itu sendiri.

Pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penggunaan lahan untuk usaha mempunyai berbagai macam kebijakan, dimana salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.

Terdapat permasalahan mengenai Izin Mendirikan Bangunan, yaitu ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Dari hasil penelitian pendahuluan di Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten masih banyak bangunan untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka diajukan dan dirumuskan judul penelitian: “Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk Kegiatan Usaha di Kabupaten Klaten”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten?
2. Apa upaya pemerintah untuk penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten.

Tinjauan Pustaka

A. Penegakan Hukum Administrasi

Istilah penegakan hukum yang sering kali digunakan untuk menerjemahkan istilah *law*

enforcement yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Pengertian penegakan hukum menurut Jimly Ashiddiqie adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Penegakan hukum administrasi dikenal penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak yang berkaitan dengan masalah perizinan agar memahami apa yang diinginkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum, khususnya menyangkut soal perizinan.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum

Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut. Ada beberapa sanksi-sanksi administrasi yang khas antara lain :

- a) *Bestuursdwang* (paksaan Pemerintah);
- b) Penarikan Kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi) ;
- c) Pengenaan denda administrasi ;
- d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

B. Pelanggaran

Pelanggaran ada yang datang dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dari segi hukum pidana pelanggaran terhadap norma hukum pidana segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan pelanggaran dari segi hukum perdata adalah pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Pelanggaran menurut hukum administrasi adalah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan umum Negara dan perbuatan pejabat atau badan administrasi Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

C. Izin Mendirikan Bangunan untuk Kegiatan Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung menegaskan bahwasanya Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana yang berdiri sendiri untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana yang berdiri sendiri sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pengertian Izin Mendirikan Bangunan menurut Susanta adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi, sekelompok orang atau badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan karena telah memenuhi ketentuan dari berbagai aspek, baik pertanahan, teknis, perencanaan serta lingkungan.

Setiap orang yang memiliki bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan gedung. Izin Mendirikan Bangunan adalah awal surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.

Pengertian kegiatan usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan

mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.

Di Indonesia dikenal adanya usaha mikro kecil dan menengah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah definisinya adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, antara lain meliputi:
 - (a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, atau
 - (b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pada umumnya, usaha menengah ini dalam pembiayaan perbankan masuk dalam segmen kredit dengan nilai pinjaman dari sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah).

2. METODE

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif.

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung dan bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi pemerintah resmi.

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepeustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu Ibu Nurul Hidayah Bagian Informasi Dinas Perizinan Kabupaten Klaten, Bapak Sulamto Bagian Penegakan Peraturan Daerah Klaten dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten, Bapak Mursidi Bagian Perencanaan terkait data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bahan hukum primer akan dianalisis sesuai dengan lima tugas ilmu hukum, sebagai berikut:

- a. Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- b. Sistematikasi akan dilakukan secara vertikal, horizontal maupun dengan fakta sosial. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung. Sehingga prinsip

hukumnya adalah subsumsi jadi tidak diberlakukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Secara fakta sosial tidak ada kesesuaian antara suatu aturan yang ada dengan fakta sosial yang ada di Kabupaten Klaten.

- c. Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi, dikritik, atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- d. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada hukum primer yaitu penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha.
- e. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan untuk mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
- f. Proses berpikir atau berprosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari skripsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban masyarakat untuk mendaftarkan IMB, informasi dan berakhir pada hasil penelitian mengenai penegakan hukum administrasi terhadap

pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Kegiatan Usaha di Kabupaten Klaten

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten yang diwakili oleh Bapak Sulamto selaku staf bidang penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten mengatakan bahwa penegakan hukum yang sering dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegakan hukum mengenai Izin Mendirikan Bangunan. Beliau menengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Klaten dalam tertib administrasi (dalam hal ini IMB) sangatlah kecil yaitu sekitar 5% - 6% saja yang sudah memiliki IMB. Bapak Sulamto menambahkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terkait IMB cenderung dilakukan terhadap kegiatan usaha.

Alur proses penyidikan pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Klaten oleh PPNS dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat atau instansi atau temuan di lapangan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, bukti pelanggaran peraturan daerah dilakukan proses penyelidikan. Proses penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. Setelah data sudah

valid atau data dianggap benar lalu dibuatlah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (yang disebut LKPPD) yang dibuat oleh PPNS. Setelah LKPPD dilakukan pemanggilan terhadap pelanggar. Pemanggilan ini menggunakan surat pemanggilan dilakukan sampai 3 kali. Setelah surat panggilan ke 3 PPNS dapat meminta bantuan oleh Polri untuk menjemput paksa pelanggar. Setelah Polri menjemput pelanggar, pelanggar dapat dibawa ke kantor PPNS atau dibawa ke Kantor Polisi. Dapat pula setelah dilakukan surat pemanggilan petugas PPNS mengeluarkan Surat Peringatan kepada pelanggar tanpa meminta bantuan oleh Polri. Dengan adanya panggilan ini sudah masuk ranah penyidikan.

Setelah proses penyidikan oleh PPNS selesai maka dilakukan pelimpahan ke Penuntut Umum melalui kepolisian/polri sebagai Kordinator Pengawas (Korwas) PPNS. Setelah dinyatakan berkas lengkap maka dapat dilakukan pelimpahan ke pengadilan untuk dilakukan sidang.

Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten. Wewenang yang diberikan Bupati kepada Satuan Polisi Pamong Praja berupa kewenangan yang bersumber dari kewenangan delegasi. Kewenangan delegasi

merupakan kewenangan pemerintah dari satu organ pemerintahan yang satu ke organ pemerintahan yang lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan produk hukum daerah.

Proses penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan IMB ada 2 yaitu:

a. Bersifat Preventif

Sifat preventif dalam penegakan hukum administrasi adalah penegakan hukum yang bersifat mencegah. Penegakan hukum yang preventif meliputi:

1. Sosialisasi mengenai ketentuan Peraturan Daerah Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
2. Persuatif, monitoring dan pengawasan secara terpadu dengan SKPD. Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pengawasan kepada bangunan-bangunan untuk kegiatan usaha ini langsung terjun kelapangan dengan mendatangi satu-persatu bangunan yang sedang dalam proses pembangunan dan ditanyai berkaitan Izin Mendirikan Bangunan.
3. Penindakan Tegas
Penindakan tegas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

adalah dengan memberikan sanksi-sanksi administratif.

b. Bersifat Represif

Sifat represif dalam penegakan hukum administrasi adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum yang represif meliputi :

1. Pembinaan persuatif

Pembinaan persuatif adalah pembinaan untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku seseorang sehingga berperilaku sesuai dengan yang diperintahkan. Pemilik bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan ini setelah dilakukan pembinaan persuatif lalu pemilik bangunan dipanggil ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Klaten untuk dimintai keterangan berkaitan dengan tanah yang digunakan untuk membangun, izin berkaitan dengan bangunan, dan fungsi bangunan itu untuk apa. Setelah pemilik bangunan dimintai keterangan petugas Satuan Polisi Pamong Praja membuat berita acara pembinaan. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja ini mengeluarkan

- berita acara pembinaan dan melakukan pembinaan persuatif selama 15 hari kerja.
2. Surat peringatan
Surat peringatan adalah salah satu sarana pembinaan bagi pemilik bangunan apabila melakukan sebuah pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Klaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Surat peringatan ini diberikan pada pelanggar ketentuan IMB apabila pembinaan persuatif tidak dihiraukan. Pemberian surat peringatan ini ada 3 kali yaitu:
 - a) Ada waktu 7 hari. Apabila sang pelanggar tidak menghiraukan surat peringatan pertama maka akan ada surat peringatan kedua;
 - b) Diberi waktu selama 7 hari. Apabila sang pelanggar tidak menghiraukan surat peringatan kedua maka akan ada surat peringatan ketiga;
 - c) Surat peringatan ke-tiga ini diberikan waktu selama 3 hari.
 3. Eksekusi penghentian dan penyegelan
Fungsi dari penyegelan ini adalah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran lainnya pada bangunan yang sedang dibangun. Prosedur penyegelan adalah apabila surat peringatan ke-tiga tidak dihiraukan maka petugas Satuan Polisi Pamong Praja membacakan surat peringatan tersebut didepan bangunan dan orang-orang yang ada di bangunan tersebut, lalu petugas yang akan melakukan penyegelan diberi surat tugas penyegelan.
 4. Pembongkaran bangunan
Pembongkaran bangunan awalnya diserahkan dulu kepada pemilik bangunan agar pemilik bangunan dapat membongkar sendiri bangunannya. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk mengambil barang-barang yang dapat digunakan lagi. Waktu yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada pemilik bangunan adalah 7 hari kerja, apabila pemilik bangunan tidak membongkar bangunannya pada hari ke-7 maka petugas Satuan Polisi Pamong Praja akan membongkar sendiri bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

- b. Upaya Pemerintah untuk Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Kegiatan Usaha

1. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan. Biasanya sosialisasi ini dilakukan di Kantor Kecamatan setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Untuk sosialisasi mengenai Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha dari kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mengundang pengusaha kecil dan menengah, Lurah, Tim Pengerak PKK atau biasanya disebut sebagai TPPKK dan Muspika biasanya adalah aparat kepolisian dari Polsek ataupun Koramil.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah berupaya untuk melakukan pembinaan kepada setiap anggota yang ingin mendaftarkan usahanya dan belum memiliki IMB.
3. Upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk pelanggaran ketentuan IMB untuk kegiatan usaha yaitu :
 - a. Sosialisasi
 - b. Persuatif, monitoring dan pengawasan secara terpadu dengan SKPD.
 - c. Penindakan Tegas

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya atau berdasarkan

hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk Kegiatan Usaha di Kabupaten Klaten dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan penegakan hukum administrasi dengan baik. Hal ini dikarenakan proses penegakan didasarkan pada ketertiban umum masyarakat, petugas Satuan Polisi Pamong Praja melihat bahwa letak bangunan untuk kegiatan usaha itu sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu, penegakan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Upaya pemerintah untuk penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan, dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah berupaya untuk melakukan pembinaan kepada setiap anggota yang ingin mendaftarkan usahanya dan belum memiliki IMB, sedangkan dari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan dan atau

sosialisasi, serta persuatif, monitoring dan pengawasan secara terpadu dengan SKPD dan Penindakan Tegas.

5. REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Ahmad Sukardja, 2014, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.

Bintaro Tjokoaminoto, 1995, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.

Dwi Yuni, 2008, *Panduan Praktis Mengurus IMB*, Pustaka Grahatama, Yogyakarta.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi/Hukum*, Yogyakarta.

Inu Kencana Syafie, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Kusno Wijoyo, 2006, *Mengurus IMB dan Permasalahannya*, Pemko Bekasi, Jakarta.

Lukman Santosa, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai*

Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Marihot Pahala Siahaa, 2008, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, dkk. 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunarto, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka, Yogyakarta.

SF Marbun dan Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Susanta, Gatot, 2002, *Mudah Mengurus IMB*, Asa Sukses, Jakarta.

Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Sri Pudyatmoko Y, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

-----, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Internet:

<http://jogja.tribunnews.com/2016/05/01/potensi-usaha-besar-sasaran-sensus-ekonomi-dilakukan-global>, diakses Selasa 15 November 2016, pukul 12.47 wib.

<http://Kemalang.Klaten.info/2013/09/melihat-Klaten-dan-sejarahberdirinya.html?m=1>, diakses tanggal 21 November 2016, pukul 13.53 wib.

<https://Klatenkab.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/10>, diakses tanggal 14 November 2016, pukul 18.13 wib.

http://m.kompasiana.com/ratihsyifani.kompasiana.com/Kabupaten-Klaten-terancam-bangkrut_552bf4876ea834e5758b45a0, diakses tanggal 10 Oktober 2016, pukul 15.47 wib.

<http://tarmizi.wordpress.com/> diakses Kamis 8 September 2016, pukul 23.09 wib.

http://www.academia.edu/8986598/HUKUM_PERIZINAN_materi, diakses hari Selasa tanggal 27 September 2016, pukul 20.45 wib.

<http://www.zonasiswa.com/2015/10/pengeertian-pemerintahan-legislatif.htm>, diakses 14 November 2016, pukul 12.35 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kbbi.web.id/langgar> diakses Kamis 8 September 2016, pukul 22.40 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kbbi.web.id/usaha>, diakses tanggal 3 September 2016 pukul 14.50 wib.

<https://www.academia.edu/5090235/Hukum>, diakses Jumat 25 November 2016, pukul. 10.03 wib.

[www.academia.edu/9308985/Hukum Administrasi Negara](http://www.academia.edu/9308985/Hukum_Administrasi_Negara), diakses

Minggu 2 Oktober 2016, pukul 15.20 wib.

www.Klatenkab.go.id/daftar-pejabat/, diakses tanggal 14 November 2016, pukul 17.49 wib.

Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesia:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532.

Peraturan Daerah KabupatenKlaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung , Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 70.

Tesis/Disertasi:

Mareci Susi Afrisca Sembiring, 2015, *Efektivitas Advis Planning dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Pematangsiatar*, Skripsi, Strata-I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Brosur:

Brosur Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten